



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM DI LAUT OLEH
KORPS POLISI PERAIRAN DAN UDARA DALAM
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Diajukan oleh:
HAYIK WIBOWO
NPM. 191003742017552**

**SEMARANG
2024**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM DI LAUT OLEH KORPS
POLISI PERAIRAN DAN UDARA DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh:
Hayik Wibowo
NPM. 191003742017552

Mengesahkan
Tim Penguji,
[Signature]
Ketua,
Mig Iriyanto Legowo, SH., M.Si
NIDN. 0610016201

Anggota,
[Signature]

Maridjo, SH., MH
NIDN. 0611056001

Anggota,
[Signature]

Juhari, SH., M.Hum
NIDN.0629036301



Mengetahui
Dekan,
[Signature]
Prof. Dr. Edy Isdiyono, SH, M.Hum.
NIDN.0625046301

**SEMARANG
2024**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIAT	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Pembatasan Masalah	10
C. Perumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum.....	14
B. Tinjauan Khusus	31
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	45
B. Spesifikasi Penelitian	45
C. Sumber Data	46
D. Metode Pengumpulan Data	47
E. Metode Penyajian Data.....	48
F. Metode Analisis Data	49
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	
A. Kewenangan Korps Polisi Perairan dan Udara dalam Penegakan Hukum di Laut	50
B. Putusan Praperadilan di PN Kendal sejalan dengan Prinsip Perlindungan HAM di dalam KUHAP.....	59
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	95

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul kewenangan penegakan hukum di laut oleh Korps Polisi Perairan dan Udara dalam peraturan perundang-undangan Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa ketiga persoalan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis dan pendekatan politik hukum. Bahan data yang digunakan adalah data bersumber pada dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. sumber data diperoleh dari hasil penelitian langsung di lapangan melalui wawancara dengan narasumber serta bahan-bahan hukum. Proses berpikir dalam penelitian ini adalah proses berpikir deduktif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kewenangan, Teori Perundang-undangan dan Teori Efektivitas.

Hasil penelitian dan kesimpulan menunjukkan bahwa Korps Polairud mempunyai banyak kewenangan di dalam sektor penegakan hukum di laut mulai dari: Perikanan; Pelayaran; Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Kelautan; dan Perairan Indonesia. Dengan banyaknya kewenangan yang dimiliki dalam praktiknya menimbulkan beberapa kendala antara lain: kendala-kendala yang bersifat yuridis, organisasi maupun implementasi. Untuk perlu dilakukan upaya-upanya untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan peningkatan koordinasi antar lembaga, peningkatan faktor kepemimpinan, memperbaiki cara pandang inspektorat pengawas\

Kata kunci: Kewenangan Korps Polairud, penegakan hukum